KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR minta gaji naik: seluruh fraksi menyetujui usulan kenaikan gaji
Tanggal : Rabu, 25 April 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

DPR MINTA GAJI NAIK

Seluruh fraksi menyetujui usulan kenaikan gaji.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah menaikkan tunjangan dan penghasilan mereka dalam anggaran 2019. Permintaan itu dimasukkan oleh anggota Dewan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran DPR Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 7,7 triliun.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, menuturkan alasan permintaan itu adalah sejak 2014 para anggota Dewan tidak mengalami kenaikan tunjangan. "Seperti tunjangan jabatan, dan idealnya ada penyesuaian tiap tahun," ujar dia di kantornya, Kamis pekan lalu.

Damayanti tidak merinci berapa kenaikan yang diusulkan oleh DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga untuk 2019. Namun ia membenarkan bahwa permohonan serupa pernah dilontarkan oleh DPR pada Oktober tahun lalu agar masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

Dalam dokumen itu, jika pemerintah menyetujui, setiap anggota DPR akan mendapatkan total penghasilan Rp 136 juta, atau naik sekitar 88 persen dari pendapatan mereka yang sebesar Rp 72,3 juta. Kenaikan itu di antaranya terdapat pada tunjangan kehormatan dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 11,6 juta; tunjangan komunikasi dari Rp 15,5 juta menjadi Rp 24,5 juta; serta kegiatan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang masing-masing mendapatkan Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta.

Namun, Damayanti melanjutkan, kenaikan itu belum tentu dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah. "Pengajuan ini seperti sayembara. Kalau mengajukan lima, bisa dapat dua. Penyesuaian dengan kondisi keuangan negara," ujarnya. Adapun Ketua Badan Urusan Rumah Tangga dari Fraksi Golkar, Anton Sihombing, pada

DIAM-DIAM MINTA KENAIKAN TUNJANGAN

DEWAN Perwakilan Rakyat memanfaatkan rancangan kerja dan anggaran 2019 untuk menaikkan penghasilan mereka. Usul itu merupakan kelanjutan dari permintaan serupa pada 2017, yang saat ini belum dijawab oleh pemerintah. Berikut ini penjabarannya:

2018		USULAN 2019
Rp 821,1 miliar	Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Naik: **1,54%**	Rp 833 miliar
Rp 53,2 miliar	Akomodasi Pimpinan dan Anggota DPR Naik: **3,23%**	Rp 54,96 miliar
Rp 57,1 miliar	Komunikasi Naik: **0,68%**	Rp 51,5 miliar

USULAN KENAIKAN TAKE HOME PAY DPR

SAAT INI		USULAN
Rp 72,3 juta	Anggota DPR	Rp 136 juta
Rp 73,9 juta	Wakil Ketua Komisi	Rp 147,7 juta
Rp 74,9 juta	Ketua Komisi	Rp 155,1 juta
Rp 75,5 juta	Wakil Ketua DPR	Rp 175,9 juta
Rp 82,3 juta	Ketua DPR	Rp 208,1 juta

SUMBER: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DPR DAN DOKUMEN BURT
NASKAH: HUSSEIN ABRI DONGORAN

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

awal April lalu juga membenarkan ada usul kenaikan tunjangan itu.

Usul kenaikan dana DPR ini resmi menjadi putusan rapat paripurna pada 10 April lalu. Ketika itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari Fraksi Golkar, Anton Sihombing, menuturkan dana Rp 7,7 triliun dibagi menjadi dua usul, yakni Rp 4,8 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,8 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Dari kenaikan itu, di antaranya ada mata anggaran Rp 833,8 miliar untuk gaji, honorarium, dan tunjangan DPR yang masuk dalam satuan kerja Dewan. Pada tahun ini, anggaran untuk gaji, honor, dan tunjangan Dewan sebesar Rp 821,1 miliar. Selain itu, ada akomodasi pimpinan dan anggota Dewan sebesar Rp 54,9 miliar. Tak satu pun fraksi yang menolak usul tersebut.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, juga menyoroti usul kenaikan anggaran DPR yang janggal ini. Contohnya dana gaji, honorarium, dan tunjangan DPR. Menurut dia, dari dana Rp 833,8 miliar dan dibagi dengan 560 anggota DPR, para anggota Dewan bisa mengantongi sekitar Rp 120 juta per bulan. "Atau sekitar Rp 1,5 miliar per tahun," ujarnya.

Fitra juga meminta kepada DPR agar usul kenaikan dana ini diberitahukan ke masyarakat. Apalagi selama ini DPR kerap tertutup ihwal anggaran yang mereka gunakan.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mencurigai rencana kenaikan gaji ini untuk membantu para anggota Dewan yang akan berkampanye pada Pemilu 2019. "Mungkin karena butuh modal besar, para anggota Dewan mencari tambahan lewat kenaikan gaji," katanya. ●